

Jumat, 22 Desember 2023

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	KEWENANGAN 'PENYIDIK TUNGGAL' OJK DILUCUTI
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	MK Hapus Wewenang OJK sebagai Penyidik Tunggal Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	22/12/2023
Sentimen	positive

| UJI MATERI UU PPSK |

KEWENANGAN 'PENYIDIK TUNGGAL' OJK DILUCUTI

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan kini tidak lagi menjadi penyidik tunggal dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, kewenangan yang selama ini diberikan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan kepada regulator.

Penulis: H. Ulfah & Rika Anggrani
redaksi@bisnis.com

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya kemarin, Kamis (21/12), mengabulkan permohonan uji materi Pasal 49 ayat (5) UU PPSK yang mengatur bahwa penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.

MK menghapus frasa "hanya" dalam pasal itu.

Dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan, MK menegaskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan konstitusional sepanjang pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan penyidik Polri.

Selanjutnya, oleh karena kedudukan OJK secara kelembagaan dibentuk berdasarkan UU yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945, maka sesungguhnya OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya sebagai lembaga penunjang (*auxiliary agencies*) terhadap organ negara lainnya, khususnya yang memiliki kewenangan sejenis atau saling mempunyai relevansi.

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan OJK bukan merupakan penyidik utama. Hal ini berkenaan dengan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dalam hal ini penyidikan pada sektor jasa keuangan, yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana umum.

"OJK bukan merupakan penyidik utama, tetapi sebagai penyidik penunjang (*supporting system*) dari penyidik utama yang kewenangannya berada pada kepolisian," kata Arief dikutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis (21/12).

Adapun dalam amar putusan, MK menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 UU PPSK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sepanjang frasa "hanya" dapat dilakukan oleh

penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat (5) UU No 21/2011 tentang OJK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), bertentangan dengan

keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Polri.

Selanjutnya, oleh karena kedudukan OJK secara kelembagaan dibentuk berdasarkan UU yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945, maka sesungguhnya OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya sebagai lembaga penunjang (*auxiliary agencies*) terhadap organ negara lainnya, khususnya yang memiliki kewenangan sejenis atau saling mempunyai relevansi.

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan OJK bukan merupakan penyidik utama. Hal ini berkenaan dengan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dalam hal ini penyidikan pada sektor jasa keuangan, yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana umum.

"OJK bukan merupakan penyidik utama, tetapi sebagai penyidik penunjang (*supporting system*) dari penyidik utama yang kewenangannya berada pada kepolisian," kata Arief dikutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis (21/12).

Adapun dalam amar putusan, MK menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 UU PPSK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sepanjang frasa "hanya" dapat dilakukan oleh

buat laporan dugaan tindak pidana ke Mabes Polri, tetapi ditolak karena, Polri tidak berwenang.

Ketua Tim Advokasi Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 Ghulam Naja menyambut baik putusan MK.

"Maknanya sekarang, baik OJK maupun Polri, berwenang melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan," kata Ghulam kepada *Bisnis*, kemarin.

Aturan Baru
Asuransi Kredit
Meluncur, Buat
Apot?



keuangan yang akan memengaruhi independensi dan integritas penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan," lanjutnya.

Putusan MK menimbulkan konsekuensi bagi aturan turunan yang diterbitkan OJK. OJK menerbitkan POJK No. 16/2023 'Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan pada Agustus 2023.

POJK ini mengatur kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, tindak lanjut hasil penyidikan, permintaan keterangan dari lembaga jasa keuangan dan pemblokiran rekening, serta administrasi penyidikan.

PUTUSAN TEPAT

Pengamat hukum dari Universitas Brajajaya, Fachrizal Afandi, menyebut putusan MK sudah tepat. Menurutnya, frasa "hanya" OJK yang menjadi penyidik tunggal tersebut agak problematik.

"Karena kita lihat untuk tindak pidana yang terkait jasa keuangan itu kan kita menemukan pelaku tindak pidananya melakukan perbuatan, misalnya dia melanggar tindak pidana itu dan tindak pidana lain. Maka, penyidik OJK saja kan enggak bisa, harus penyidik Polri," katanya saat dihubungi.

Setelah putusan MK ini, maka penyidik OJK bisa melakukan penyidikan, begitu juga dengan polisi.

"Karena kan di KUHP disebut polisi penyidik, bahkan penyidik. Korupsi saja penyidiknya lebih dari satu. Ada KPK, jaksa, ada penyidik polisi. Jadi, saya kira enggak ada yang tunggal. Kalau ada frasa itu, agak aneh," ujarnya. □



SP NIBA

sebelumnya menyatakan monopoli penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan dikhawatirkan menimbulkan perilaku koruptif, karena pengawasan penyidikan menjadi tidak jelas dan memberikan kelonggaran terhadap oknum-oknum di industri jasa keuangan.

"Hanya penyidik OJK yang dapat melakukan penyidikan, sedangkan anggaran operasional OJK berasal dari pungutan industri jasa

Judul	Restrukturisasi Polis Jiwasraya
Nama Media	Kontan
Newstrend	Perkembangan Restrukturisasi Jiwasraya
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	22/12/2023
Sentimen	positive

Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Jelang akhir tahun, restrukturisasi Jiwasraya belum beres

Arif Ferdianto

JAKARTA. Proses restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya bakal berakhir di akhir bulan ini. Hasilnya, jumlah pemegang polis (pempol) yang ikut restrukturisasi mencapai 99,6% hingga November 2023.

Ada tiga opsi restrukturisasi polis (*lihat tabel*). Sekretaris Perusahaan Jiwasraya, Kompyang Wibisana menyebutkan hingga November 2023 terdapat 948 polis yang mengambil program JS Mantap Plus Plan A, sebanyak 7.450 polis mengambil Program JS Mantap Plus Plan B dan 8.922 polis mengambil Program JS Mantap Plus Plan C.

"Kami mengimbau agar pemegang polis yang belum mengikuti untuk segera mendaftarkan polisnya dalam program restrukturisasi polis Jiwasraya," ujar Kompyang.

Tapi jika pemegang polis menolak program restrukturisasi dan tetap di Jiwasraya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku.

Nasabah menolak

Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG), Hexana Tri Sasongko menyebut jumlah nasabah Jiwasraya yang menolak restrukturisasi kurang dari 0,4%. "Tidak banyak yang menolak restrukturisasi, hanya kurang dari 0,4%. Itu nilainya sekitar Rp 500 miliar," kata dia.

Salah satu nasabah bancassurance Jiwasraya yang menolak adalah Harry. Dia mengaku, sudah ditawarkan berkali-kali. "Mereka mengklaim menghormati pilihan nasabah, tetapi kami diintimidasi. Mereka menyebut, kalau tidak

ikut pindah disebut tidak dapat jatah PMN, hasil sitaan juga tidak punya hak, kalau tidak ikut pindah nanti cuma dapat aset sisa," cerita dia.

Nasabah lain, O.C Kaligis menyatakan akan minta kembali uangnya kembali. Dia menyebutkan, dananya di Jiwasraya Rp 30 miliar. Dia meminta, uangnya kembali tanpa bunga yang dijanjikan.

Sebelumnya, IFG Life memaparkan jika telah menerima pengalihan polis dari Jiwasraya Rp 32,13 triliun atau sekitar 83% dari total polis yang telah direstrukturisasi di Jiwasraya. Di periode sama, IFG Life juga sudah membayarkan manfaat klaim Rp 9,65 triliun.

Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo bilang pemerintah telah memberikan PNM Rp 22 triliun kepada IFG Life. Tapi pemegang polis yang setuju restrukturisasi belum menerima pembayaran. ■

Tiga Opsi Restrukturisasi Polis Saving Plan Jiwasraya

1. Program JS Mantap Plus Plan A

- Masa kontrak asuransi JS Mantap Plus ini berlaku selama 15 tahun
- Pembayaran manfaat dari JS Mantap Plus Plan A secara bertahap setiap tahun. Sebesar 5% di tahun pertama sampai dengan ke-10, kemudian 10% di tahun ke-11-15.
- Pemegang polis mendapat asuransi kecelakaan 25% dari dana awal.
- Polis tidak dapat dibatalkan selama masa kontrak, kecuali dalam hal pemegang polis meninggal dunia.

2. Program JS Mantap Plus Plan B

- Masa kontrak asuransi jenis ini berlaku selama 5 tahun
- Pembayaran manfaat akan dilakukan secara bertahap setiap tahun masing-masing sebesar 15%, 5%, 5%, 5%, dan 41% di tahun terakhir.
- Jumlah nominal pembayaran bertahap adalah sebesar 71% dari dana awal (ada potongan penyesuaian sebesar 29%).
- Pemegang polis mendapat asuransi kecelakaan sebesar 25% dari dana awal.
- Polis tidak dapat dibatalkan selama masa kontrak kecuali dalam hal pemegang polis meninggal dunia.

3. Program JS Mantap Plus Plan C

- Masa kontrak jenis polis asuransi ini selama lima tahun
- Pembayaran di muka sebesar 10%
- Pembayaran akan dilakukan secara bertahap setiap tahun masing-masing 10%, 5%, 5%, 9%, dan 30% di akhir.
- Jumlah nominal pembayaran bertahap adalah sebesar 69% dari dana awal (ada potongan penyesuaian 31%).
- Polis tidak dapat dibatalkan selama masa kontrak kecuali dalam hal pemegang polis meninggal dunia.

Judul	AHAP Antisipasi Stagnasi Premi, Indonesia Re Lebih Selektif
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Strategi Bisnis Indonesia Re
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	22/12/2023
Sentimen	positive

| PENDAPATAN PERUSAHAAN ASURANSI |

AHAP Antisipasi Stagnasi Premi, Indonesia Re Lebih Selektif

Bisnis, JAKARTA — PT Asuransi Harta Aman Pratama (AHAP) mengantisipasi stagnasi pendapatan premi tahun ini karena tidak melanjutkan produk asuransi kesehatan.

Perseroan memperkirakan pendapatan premi tahun ini tidak akan berselisih jauh dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp680 miliar.

"Akhir tahun ini mungkin masih Rp600 miliar-an, tidak lebih dari tahun lalu," kata Direktur Kepahitan sekaligus Sekretaris Perusahaan AHAP Sutjiarta dalam paparan publik, Kamis (21/12).

Dia mengatakan asuransi kesehatan perseroan pada tahun lalu menyumbang sekitar Rp80 miliar. Namun, perseroan memilih tidak meneruskan karena performa asuransi kesehatan defisit.

Untuk tahun depan, Sutjiarta mengatakan perusahaan masih mengandalkan lini asuransi harta benda sebagai penopang premi dengan target Rp673 miliar.

Menurutnya, pasar asuransi umum di Indonesia masih didominasi oleh asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor.

"Asuransi harta benda menjadi salah satu kontribusi yang diharapkan tercapai cukup besar tahun depan," ungkapnya.

AHAP mencatatkan premi bruto mencapai Rp484 miliar pada kuartal III/2023. Kontributor premi paling besar adalah asuransi harta benda yang mencapai Rp216 miliar atau 44,75% dari total premi. Penyumbang premi berikutnya ada-

lah lini usaha asuransi *engineering* atau rekraya yang mencapai 22,13%, disusul asuransi kendaraan 20,54%, pengangkutan 6,76%, aneka 1,94%, kesehatan 2,04%, rangka kapal 1,67%, kecelakaan diri 0,07%, dan tanggung gugat 0,23%.

Sementara itu, PT Reasuransi Indonesia Utama (Pensero) menyatakan akan lebih selektif menentukan sumber premi tahun depan.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu mengatakan perseroan ingin lebih berhati-hati dalam mengelola risiko dan menempatkan bisnis. Jika premi tinggi, potensi klaimnya bisa lebih tinggi.

"Premi itu bukan sengaja kami turunkan, tapi ini beda. Namun, memang

kami lebih berhati-hati menempatkan bisnis. Kami lebih selektif mendapatkan bisnis," katanya, baru-baru ini.

Menurut Benny, strategi tersebut sebetulnya sudah dilakukan Indonesia Re tahun ini meskipun premi perseroan meningkat.

Pertumbuhan itu salah satunya karena ada perusahaan reasuransi yang berhenti beroperasi tahun lalu dan Indonesia Re mendapatkan tugas menerima perpindahan *treaty* sekitar 14 perusahaan asuransi.

Berdasarkan laporan keuangan Indonesia Re pada November 2023, perusahaan mencatatkan pendapatan premi sebanyak Rp5,67 triliun, tumbuh 5,47% dari realisasi periode yang sama tahun lalu.

Indonesia Re juga akan kembali mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp1 triliun yang berasal dari dana cadangan investasi pemerintah pada 2024.

Perseroan pun membuka kemungkinan untuk mengajukan *subordinated debt* kepada Kementerian Keuangan dan menjalin kerja sama dengan investor strategis.

Dana itu nantinya akan diprioritaskan untuk penambahan modal, terutama untuk menjaga solvabilitas perseroan. RBC perseroan tercatat 134,55% pada November 2023, naik dari posisi Maret yang hanya 121%. Mendekati ambang batas minimal 120% yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Purnita H. Untari)

Judul	Menjaga Industri Jasa Keuangan di Tahun Politik
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Kinerja Industri Jasa Keuangan
Halaman/URL	Pg1&15
Tanggal Berita	22/12/2023
Sentimen	positive



Oleh Piter Abdullah Redjalam*

OUTLOOK 2024

Menjaga Industri Jasa Keuangan di Tahun Politik

Presiden Jokowi pada forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) awal Desember 2023 mengingatkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bahwa kondisi perekonomian tengah mengalami keketiangan likuiditas. Pernyataan seorang Presiden di tengah forum besar yang dihadiri begitu banyak petinggi perbankan tentu saja menarik perhatian.

Apakah sebenarnya sedang terjadi? Apakah kondisi perekonomian kita, khususnya industri jasa keuangan sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana kita seharusnya mengartikan pernyataan itu?

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae pada kesempatan lain menyatakan, kondisi likuiditas perbankan berada pada level yang aman. Hal ini ditunjukkan oleh rasio alat likuid/noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing berada di level 117,29% dan 26,36% per Oktober 2023. Dengan indikator tersebut, likuiditas perbankan jauh di atas ambang batas, yang berarti tidak ada permasalahan dengan likuiditas perbankan.

Pernyataan Presiden Jokowi dan pernyataan OJK adalah dalam konteks yang berbeda dan tidak perlu dipertentangkan.

Likuiditas perekonomian memang sedang kering ditengah kebijakan moneter global dan domestik yang selama beberapa waktu terakhir cenderung ketat. Pertumbuhan kredit perbankan tertahan di bawah 10% yang mengindikasikan perputaran uang tidak berjalan lancar dan ukuran uang ke sektor riil sangat terbatas. Kondisi ini mengancam pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Wajar jika kemudian Presiden Jokowi berteriak mengingatkan Gubernur Bank Indonesia.

Namun demikian, hal tersebut itu bukan berarti perbankan dan industri jasa keuangan lainnya sedang bermasalah. Di sektor perbankan, likuiditas sebagaimana disebutkan di atas dalam kondisi aman, didukung DPK yang sampai September 2023 tumbuh 6,54%. Pertumbuhan DPK memang sedikit melambat di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat dan meningkatnya kebutuhan investasi korporasi pasapencabutan status pandemi Covid-19.

>> KE HAL 15

Menjaga Industri Jasa Keuangan di Tahun Politik

> Sambungan dari hal 1

Sementara itu, di tengah perlambatan penyauran kredit kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL net sebesar 0,77% dan NPL gross sebesar 2,63%.

Meskipun pasar surat berharga negara (SBN) sempat tertekan, disebabkan oleh meningkatnya imbal hasil surat utang AS yang kemudian mendorong kenaikan yield SBN, risiko pasar yang terkait portfolio SBN relatif cukup termitigasi. Hal ini terjadi antara lain karena perbankan telah menyesuaikan durasi SBN serta melakukan rebalancing jenis portfolio baik yang bersifat *hold to maturity* maupun *available for sale*, sehingga potensi kerugian dari perubahan nilai wajar surat berharga tidak mengganggu permodalan bank. Industri perbankan tetap resilien dan diperkirakan dapat menyerap potensi risiko di tengah gejolak global.

Sebagaimana sektor perbankan, industri jasa keuangan nonbank, khususnya perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) juga dalam kondisi yang stabil dan sehat. Hal ini ditunjukkan oleh indikator permodalan yang terus terjaga. Industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan *risk based capital* (RBC) yang di atas *threshold* masing-masing sebesar 451,23%

dan 308,9% , jauh di atas *threshold* sebesar 120%.

Di sektor industri dana pensiun, berdasarkan Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) peringkat dana pensiun Indonesia tahun 2023 membaik dibandingkan tahun 2022. Aset dana pensiun nasional per September 2023 tumbuh 6,85% yoy dengan nilai aset sebesar Rp 360,62 triliun.

Kondisi yang juga terjaga baik terjadi di sector pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML). Pertumbuhan piutang pembiayaan masih di level yang tinggi sebesar 15,42% yoy pada September 2023 menjadi sebesar Rp 458,7 triliun, didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 26,46% dan 13,66%.

Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio *non-performing financing* (NPF) net tercatat sebesar 0,68% dan *NPF gross* sebesar 2,59%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,23 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan modal ventura di September 2023 sebesar 1,17% yoy dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp 17,68 triliun. Di sisi lain, *floatch peer to peer* (P2P) lending, mengalami pertumbuhan outstanding pembiayaan di September 2023 sebesar 14,28% dengan nominal sebesar Rp 55,7 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat dalam kondisi terjaga dan terus membaik menjadi 2,82%.

Tantangan 2024

Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank memprediksikan perekonomian global akan tumbuh lebih lambat pada tahun 2024, di tengah permasalahan geopolitik yang masih melanda beberapa wilayah seperti perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dipastikan akan berdampak kepada perekonomian Indonesia.

Apalagi, kita akan melaksanakan pemilu sepanjang tahun 2024, mulai dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada awal tahun, hingga pemilihan kepala daerah pada akhir tahun. Meskipun perekonomian nasional diyakini masih akan tumbuh positif tetapi tidak mungkin diharapkan bisa mengalami lompatan pertumbuhan yang lebih tinggi. Bank Indonesia, misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%.

Industri jasa keuangan yang menunjukkan kinerja cukup baik sepanjang tahun 2023 diharapkan bisa berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2024. Tantangan tentu akan selalu ada. Kebijakan moneter negara-negara maju khususnya Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih ketat dengan suku bunga tinggi yang lebih lama (*higher for longer*). Aliran modal asing yang sepanjang tahun 2023 lebih banyak keluar belum bisa diharapkan kembali. Rupiah masih akan mengalami banyak tekanan pelemahan dan akan bergerak di atas Rp 15.000 per dolar AS.

Selain tantangan eksternal tersebut, industri jasa keuangan harus melanjutkan konsolidasi menghadapi tantangan domestik. Di tahun 2024, kelonggaran restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berakhir. Perbankan dan lembaga pembiayaan harus mempersiapkan diri agar normalisasi restrukturisasi kredit tidak diikuti dengan lonjakan NPL. OJK diharapkan secara seksama memantau perkembangan Industri Jasa Keuangan pasca normalisasi restrukturisasi kredit.

Tantangan domestik lainnya adalah elose negatif berkembangnya keuangan digital dan fintech, yang antara lain ditunjukkan oleh terus terjadinya kasus pinjol dan investasi bodong. Literasi keuangan masyarakat khususnya di kelompok masyarakat menengah bawah harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk kejahatan keuangan.

OJK diharapkan bisa memunculkan kebijakan terobosan guna mengurangi dampak negatif perkembangan teknologi digital. Sesuai UU No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK telah menambah dua komisioner, yang satu diantaranya membidangi inovasi teknologi keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan harus diarahkan agar memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya kepada perekonomian nasional, sementara di sisi lain, dampak negatifnya dapat dimitigasi.

Tetap Optimistis

Periode 10 tahun ke depan akan menjadi penentu apakah Indonesia akan menjadi pemenang, bertransformasi menjadi negara maju atau justru menjadi pecundang. Perlu dipahami, bonus demografi yang selalu kita sebut-sebut sebagai faktor keunggulan hanya terjadi sekali seumur hidup kita.

Bonus demografi yang artinya kita memiliki jumlah penduduk muda dan produktif yang begitu besar adalah peluang terbaik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Peluang terbaik itu hanya terjadi sekali dan tidak akan berulang.

Apabila kita gagal memanfaatkan keunggulan jumlah penduduk muda dan produktif, bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi. Ketika kita tidak mampu menyediakan pekerjaan yang layak untuk semua penduduk muda kita, mereka akan menjadi pengangguran, yang kemudian menjadi tua sebelum sejahtera. Bila itu yang terjadi, tidak hanya gagal menjadi negara maju, Indonesia bahkan berpotensi kembali menjadi negara yang tertinggal dengan segunung permasalahan sosial.

Oleh karena itu, stabilitas politik dan ekonomi sangat dibutuhkan agar kesinambungan pembangunan bisa terjaga. Proses politik pergantian kekuasaan hendaknya tidak menjadi penghambat. Seluruh calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024 memiliki visi dan misi dengan semangat yang sama yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu siapapun yang menjadi pemenang pemilihan presiden diyakini akan terus menjaga perekonomian, khususnya industri jasa keuangan. Tidak ada alasan untuk pesimistis, kita harus tetap optimistis.

**Founder Segara Research Institute*

Judul	Belman Lumban Batu Bagikan 10.000 Kartu Asuransi Perindo Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi
Nama Media	editorpublik.com
Newstrend	Caleg Perindo Bagikan Asuransi MNC Life di Bekasi
Halaman/URL	https://editorpublik.com/2023/12/21/belman-lumban-batu-bagikan-10-000-kartu-asuransi-perindo-kepada-masyarakat-kabupaten-bekasi/
Tanggal Berita	21/12/2023
Sentimen	positive



Belman Lumban Batu Bagikan 10.000 Kartu Asuransi Perindo Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi

📅 Desember 21, 2023 👤 Seven Boys Meha 💬 0 Komentar 🏷️ Asuransi Perindo, Babelan, Belman Lumban Batu, Caleg Perindo, Muara Gembong, Tarumajaya

KABUPATEN BEKASI **EditorPublik.com** – Belman Lumban Batu, SE, Calon Legislatif (Caleg) yang maju dari Partai Perindo, daerah pemilihan (Dapil) 5, meliputi Kecamatan Tarumajaya, Babelan dan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, sudah membagikan sebanyak 7.000 kartu asuransi Partai Perindo dari target 10.000 jumlah kartu asuransi yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Menurut Belman Lumban Batu, adapun kegunaan asuransi yang dikeluarkan MNC life besutan Hary Tanoesoedibjo ini adalah asuransi kecelakaan dan asuransi kematian yang besaran klaim asuransinya mencapai Rp300.000 untuk kecelakaan dan Rp3.000.000 untuk asuransi kematian.

Judul	Dukung Kesehatan Mental, FWD Insurance Hadirkan Layanan Gratis FWD Mind Strength
Nama Media	kompas.com
Newstrend	FWD Insurance Luncurkan FWD Mind Strength
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2023/12/21/163700426/dukung-kesehatan-mental-fwd-insurance-hadirkan-layanan-gratis-fwd-mind
Tanggal Berita	21/12/2023
Sentimen	positive

Dukung Kesehatan Mental, FWD Insurance Hadirkan Layanan Gratis FWD Mind Strength

Kompas.com - 21/12/2023, 16:37 WIB

Erlangga Satya Darmawan, Agung Dwi E
Tim Redaksi



Suasana kegiatan FWD Celebration. (Dok. FWD Insurance)

TERPOPULER

- 1 Tiktok Shop "Comeback", Tokopedia: Semua Transaksi Akan Ada di Kami
Dibaca 3.295 kali
- 2 Menhub: Sektor Kereta Api Sedang pada Masa Jayanya...
Dibaca 1.404 kali
- 3 KRL Jabodetabek Belum Diperpanjang Sampai Karawang, Ini Sebabnya
Dibaca 1.345 kali
- 4 Menhub Imbau Masyarakat Pakai Masker Selama Perjalanan Libur Natal dan...
Dibaca 960 kali
- 5 Ragam Barang Impor di Bawah Rp 1,5 Juta yang Boleh Dijual di "E-commerce"
Dibaca 919 kali

NOW TRENDING

KOMPAS.com – Masalah **kesehatan mental** masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk segera dituntaskan.

Pasalnya, masalah tersebut berdampak serius bagi penderitanya, mulai dari penurunan kesehatan fisik, hubungan sosial terganggu, hingga depresi.

Debat Cawapres Muhaimin-Gibran-Mahfud Hari Ini: Waktu, Lokasi, Tema, dan Aturan

Judul	SWA dan IICG Kembali Gelar Indonesia Good Corporate Governance Award 2023
Nama Media	swa.co.id
Newstrend	Sejumlah Perusahaan Asuransi Jiwa di Bawah Naungan AAJI Raih Penghargaan Indonesia GCG Award 2023
Halaman/URL	https://swa.co.id/business-champions/companies/companies-good-corporate-governance/swa-dan-iicg-kembali-gelar-indonesia-good-corporate-governance-award-2023
Tanggal Berita	21/12/2023
Sentimen	positive

SWA dan IICG Kembali Gelar Indonesia Good Corporate Governance Award 2023

by Sri Niken Handayani (<https://swa.co.id/author/niken>) - December 21, 2023



SWA Media Group kembali bekerja sama dengan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) menyelenggarakan survei tahunan Corporate Governance Perception Index (CGPI). Tahun ini dianugerahkan *Indonesia Good Corporate Governance Award 2023* kepada perusahaan yang berhasil menunjukkan skor terbaik dalam penerapan GCG.

Pada penyelenggaraan GCG Award ke-22 tahun ini mengangkat tema 'Membangun Ketangkasn Perusahaan dalam Kerangka *Good Corporate Governance*'. Dalam sambutannya saat membuka acara penganugerahan GCG Award 2023 tersebut, Kemal E.Gani selaku *Group Chief Editor* SWA Media mengatakan, tema tersebut diangkat

Judul	Tanggapan Manulife Indonesia Terhadap Pemberitaan Tenaga Pemasar Herlinwaty
Nama Media	analisadaily.com
Newstrend	Tanggapan Manulife atas Gugatan Mitra Bisnis di Medan
Halaman/URL	https://analisadaily.com/berita/baca/2023/12/21/1048621/tanggapan-manulife-indonesia-terhadap-pemberitaan-tenaga-pemasar-herlinwaty/
Tanggal Berita	21/12/2023
Sentimen	positive

Tanggapan Manulife Indonesia Terhadap Pemberitaan Tenaga Pemasar Herlinwaty

© Kamis, 21 Des 2023 19:09 WIB 324x <https://analisa.link/1048621/>



Tanggapan Manulife Indonesia Terhadap Pemberitaan Tenaga Pemasar Herlinwaty (Analisadaily.com)

Menanggapi pemberitaan yang tertera pada Analisadaily.com yang berjudul "Herlinwaty Gugat PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di PN Medan" dan "Mediasi Antara Herlinwaty dengan PT Jiwa Manulife Indonesia Tak Ada Kesepakatan Baik" tertanggal 15 dan 18 Desember 2023, Manulife Indonesia sepenuhnya mematuhi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Salam hormat,

Apriliani Siregar
Direktur dan Chief Legal & Compliance Manulife Indonesia

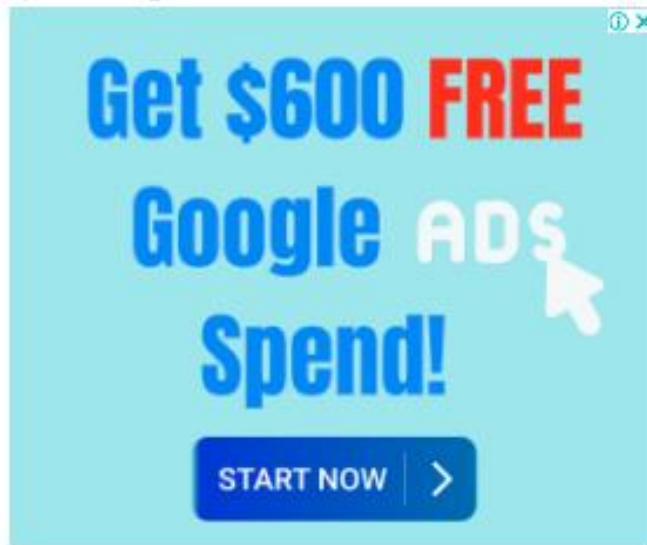
Tanggapan Manulife Indonesia Terhadap Pemberitaan Tenaga Pemasar Herlinwaty (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan – Pihak Manulife Indonesia memberikan klarifikasinya terkait pemberitaan yang terbit di Analisadaily.com pada 15 dan 18 Desember 2023 lalu.

Judul	Tidak Jadi Mengajukan KTA via Website Cekaja tapi Dapat Tagihan Asuransi
Nama Media	mediakonsumen.com
Newstrend	Keluhan terkait Chubb Life
Halaman/URL	https://mediakonsumen.com/2023/12/21/surat-pembaca/tidak-jadi-mengajukan-kta-via-website-cekaja-tapi-dapat-tagihan-asuransi
Tanggal Berita	21/12/2023
Sentimen	negative

Tidak Jadi Mengajukan KTA via Website CekAja.com, tapi Dapat Tagihan Asuransi

📅 21 Desember 2023 👤 maika 💬 Beri komentar 🏷️ Asuransi, Cekaja.com, Chubb Life Insurance, Kredit Tanpa Agunan, KTA, paket bundling, Pengajuan kredit, Telemarketing



Beberapa waktu lalu, saya ingin mengajukan KTA via website CekAja.com. Setelah saya mengajukan, saya dihubungi oleh pihak CekAja.com untuk konfirmasi. Saat konfirmasi selesai, saya disambungkan dengan bagian asuransi.

Awalnya, telemarketing bilang bahwa saya mendapat fasilitas kartu kredit. Namun setelah saya dengarkan dengan seksama, ternyata yang dimaksud adalah asuransi. Yang menjadi permasalahan, saya tidak jadi mengajukan KTA, tapi hari ini saya mendapat WhatsApp dari asuransi untuk membayar.

Judul	Mohon Asuransi PT. Panin Dai-Ichi Life Menaati Putusan Pengadilan untuk Mencairkan Klaim Asuransi Jiwa Alm. Suami Saya
Nama Media	mediakonsumen.com
Newstrend	Keluhan Nasabah Panin Dai-Ichi Life
Halaman/URL	https://mediakonsumen.com/2023/12/21/surat-pembaca/mohon-asuransi-pt-panin-dai-ichi-life-menaati-putusan-pengadilan-untuk-mencairkan-klaim-asuransi-jiwa-alm-suami-saya
Tanggal Berita	21/12/2023
Sentimen	negative

Mohon Asuransi PT. Panin Dai-Ichi Life Menaati Putusan Pengadilan untuk Mencairkan Klaim Asuransi Jiwa Alm. Suami Saya

📅 21 Desember 2023 👤 Masita 💬 8 Komentar 🏷️ Asuransi Jiwa, Klaim Asuransi, Panin Dai-ichi Life

Bunga Mulai 0,9%
Jaminan Sertifikat Rumah
 Dapatkan plafon pinjaman dengan tenor panjang hanya di BFI Finance Indonesia.

bfi.co.id BUKA



Yth. Media Konsumen,

Perkenalkan saya Masita, umur 64 tahun, dari Deli Serdang, Sumatera Utara, menyampaikan sbb:

Pada tahun 2020 Alm. Suami saya bernama Hariyono adalah nasabah PT. Panin Dai-Ichi Life yang membeli asuransi jiwa dengan dua polis, yaitu:

1. Polis nomor: 2020014234 berlaku sejak tanggal 22 Juni 2020
2. Polis nomor: 2020014558 berlaku sejak tanggal 24 Juni 2020 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Judul	Berita Foto - Mandiri Inhealth dan RS PELNI Kolaborasi Hadirkan Executive Lounge
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Kerja Sama Mandiri Inhealth dan RS Pelni
Halaman/URL	Pg14
Tanggal Berita	22/12/2023
Sentimen	positive



Istimewa

Mandiri Inhealth dan RS PELNI Kolaborasi Hadirkan Executive Lounge

Dari kiri ke kanan, Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) Jakarta dr. Santy Dahlan, Direktur Utama Mandiri Inhealth Budi Tampubolon, Plt Direktur Utama PT RS PELNI Rudy Hartono, Kepala RS PELNI Dr Iaili Fathiyah, Direktur Operasional Mandiri Inhealth Jenni Wihartini saat meresmikan Executive Lounge di RS PELNI, Jakarta, kemarin. Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih dan eksklusif terhadap Tertanggung Mandiri Inhealth. Lounge ini dapat digunakan sebagai sumber informasi, penanganan keluhan, pengendalian layanan terpadu, serta kenyamanan fasilitas lainnya.